



**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
NOMOR 115 TAHUN 2016**

**TENTANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PERBEKALAN FARMASI  
PADA DINAS KESEHATAN**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dijelaskan Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta penghapusan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan perlu dibentuk UPTD Perbekalan farmasi dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbekalan farmasi pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERBEKALAN FARMASI PADA DINAS KESEHATAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbekalan farmasi Pada Dinas Kesehatan.
12. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbekalan Farmasi pada Dinas Pekerjaan Kesehatan Kota Depok.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPTD.

## **BAB II**

### **P E M B E N T U K A N**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbekalan Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Depok.

#### **KEDUDUKAN**

#### Pasal 3

- (1) UPTD Perbekalan Farmasi adalah Unsur Pelaksana untuk menunjang operasional Dinas Kesehatan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang Kesehatan dibidang penyediaan obat-obatan.
- (2) UPTD Perbekalan Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB IV**  
**ORGANISASI**

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Walikota ini, Unsur Organisasi UPTD terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kasubag Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon Iva;
- (2) Kasubag TU UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IV b

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPTD

## Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kesehatan dibidang pengelolaan Perbekalan farmasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini Kepala UPTD mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan UPTD di bidang pengelolaan perbekalan farmasi mengacu kepada rencana strategis dinas;
  - b. pelaksanaan perencanaan teknis penyediaan obat-obatan;
  - c. pelaksanaan pengawasan terhadap mutu dan khasiat obat dan peralatan kesehatan secara umum baik dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan ;
  - d. pelaksanaan pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian obat;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas upt; dan;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya

## Paragraf 2

### Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD;

- b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja diseluruh satuan organisasi dilingkungan UPTD;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Kepala UPTD dan seluruh satuan organisasi dilingkungan UPTD;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran UPTD dibawah koordinasi Sekretaris Dinas;
- f. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
- g. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perbekalan farmasi;
- h. penghimpunan dan inventarisasi peraturan-peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan perbekalan farmasi
- i. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan tugas UPTD;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD secara berkala;dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

##### Bagian Pertama

##### U m u m

#### Pasal 11

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD sebagai Pelaksana urusan Pengelolaan Jalan dan drainase lingkungan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Jabatan fungsional umum dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.



Bagian Kedua

P e l a p o r a n

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**BAB VI**

**K E P E G A W A I A N**

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan kepegawaian dilingkup UPTD.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala UPTD ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan pelaksana Sub bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 29 November 2016  
**WALIKOTA DEPOK,**

**TTD**

**KH. DR. MOHAMMAD IDRIS, MA**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 29 November 2016  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**H. HARRY PRIHANTO**  
**NIP. 19661206 198612 1 001**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 115**

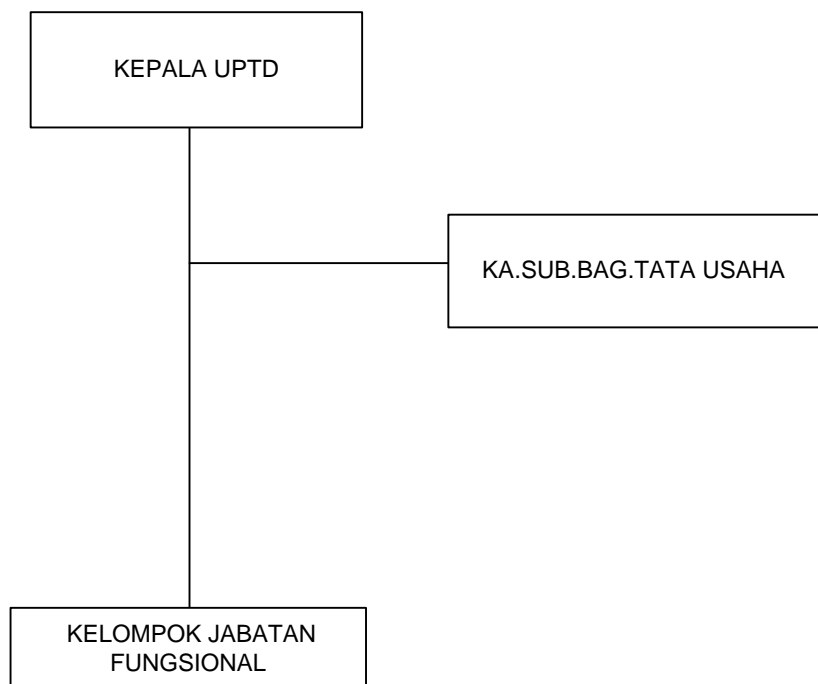
**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK**

  
**N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH.,M.Hum**  
**NIP. 19700127 199803 2 004**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
NOMOR : 115  
TAHUN : 2016

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERBEKALAN FARMASI PADA DINAS  
KESEHATAN

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERBEKALAN FARMASI  
PADA DINAS KESEHATAN**



**WALIKOTA DEPOK,**

**TTD**

**KH. MOHAMMAD IDRIS**